

Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) (Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

Laorien Naivalent Masbut, Atik Rahmawati
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rahmadilli@gmail.com

ABSTRACT

Illiterate community is a community with a low level of social welfare, especially in the field of education. However, this affects the economic and social development. Indonesia still has a high illiteracy rate. Therefore, the government started issuing a policy in purpose of eradicating illiteracy through the functional literacy (KF) program. Karangpring village, District of Sukorambi, Jember Regency which is a village with large plantations and rice fields has a fairly high number of illiterate people. This village has implemented functional literacy program since 2006 until now. The program that has been implemented is going well because the organizers and the tutors of of the program have many strategies in order that people enthusiastic and motivated to learn *calistung* (reading, writing and counting). Thus, many illiterate people have been benefited mainly in their daily lives while reading, writing, counting, listening and speaking. The communities that have been good in *calistung* can monitor their children learning progress at school and get information they did not know by reading and counting.

Keywords: Illiteracy, Functional Literacy

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang masih terbelang memiliki angka buta huruf yang tinggi. Sejauh ini angka buta huruf di Indonesia sedikit demi sedikit mencapai penurunan. Khususnya di Provinsi Jawa Timur. Menurut data BPS pada tahun 2010 jumlah buta huruf di Jawa Timur sebanyak 1,9 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2012 jumlah buta huruf di Jawa Timur sebanyak 1,2 juta jiwa. Ini

berarti buta huruf di Jawa Timur mengalami penurunan sebanyak 700 ribu jiwa dalam kurun waktu dua tahun. Selain itu, pada tahun 2012, dari 17 kabupaten di Jatim yang masuk zona merah, kini sudah berkurang 4 kabupaten. Berarti tersisa 13 kabupaten zona merah, yakni Sumenep, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi (bappeda.jatimprov.go.id). Dari informasi di atas menunjukkan bahwa

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang tergabung dalam kategori zona merah dengan angka buta huruf yang tinggi.

Pada tahun 2006 dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu (Pemerintah Kabupaten Jember:2012). Dengan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dengan mengeluarkan suatu upaya bentuk kebijakan untuk memberdayakan masyarakat dari kebutaaksaraan dengan diberi nama program Keaksaraan Fungsional. Keaksaraan Fungsional adalah suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar. (Kusnadi.2005:192).

Salah satu desa yang telah melaksanakan program Keaksaraan Fungsional adalah Desa

Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Desa Karangpring terletak di sebelah Timur Kecamatan Sukorambi. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sebagian besar wilayahnya adalah sektor pertanian. Sejak tahun 2006 di Desa Karangpring melakukan kegiatan program Keaksaraan Fungsional. Namun, tidak setiap tahun melakukan kegiatan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena tergantung dari proposal yang dikirim oleh penyelenggara kepada Bapak Gubernur Jawa Timur. Jika proposal permohonan dana hibah tersebut ditolak maka penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di desa Karangpring tidak melakukan kegiatan program tersebut. Tetapi, setiap tahunnya penyelenggara di Desa Karangpring ini rajin mengirimkan proposal. Ini juga disampaikan oleh informan SG sebagai staf bidang PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) saat peneliti berkunjung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Ia mengatakan bahwa penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring setiap tahunnya mengajukan proposal pengajuan dana kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2012 ada ketetapan baru tentang pelaksanaan program KF, yaitu kegiatan dilakukan dengan menentukan warga belajar harus sesuai Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada.

Kegiatan Program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring yang dilaksanakan selama empat bulan dapat dikatakan berhasil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Keberhasilan suatu program Keaksaraan Fungsional dilihat pada banyaknya warga belajar yang berhasil lulus. Lulus tersebut artinya terdapat tingkat pencapaian hasil pembelajaran warga belajar dalam kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengar dan berbicara, sehingga mereka dapat dikatakan melek aksara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada 25 Agustus hingga 15 Desember 2013 dengan Keaksaraan Fungsional jenis Keaksaraan Dasar. Maka rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah “Bagaimana implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?”

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Program Keaksaraan Fungsional dan Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander dalam Adi (2013:36) Kesejahteraan Sosial merupakan

sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Sedangkan, program Keaksaraan Fungsional merupakan kegiatan salah satu bentuk usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang berbentuk suatu program. Keaksaraan Fungsional adalah suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar (Kusnadi.2005:192).

a. Tujuan Program Keaksaraan Fungsional

Adalah membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan membaca, menulis dan berhitung (Calistung) sendiri untuk membantu mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia yang dilengkapi dengan keterampilan fungsional sesuai dengan kehidupannya sehari-hari.

b. Prinsip-prinsip Program Keaksaraan Fungsional

Dalam menyusun program pendidikan keaksaraan harus memperhatikan prinsip-

prinsip pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional sebagai berikut (Kusnadi.2005:192-197) ; Konteks lokal, desain lokal, proses partisipatif, dan fungsionalisasi hasil belajar.

c. Konsepsi Belajar Orang Dewasa

konsep andragogi adalah orang dewasa berbeda dengan anak-anak dan pembelajaran untuk orang dewasa juga berbeda dengan pembelajaran untuk anak-anak karena dari sikap, pemikiran dan pengalaman mereka yang sudah berbeda pula. Semakin tumbuh dan berkembangnya seseorang semakin bertambah pula pemikiran, gagasan, sikap dan pengalaman orang tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa, orang dewasa belajar sepanjang hidupnya, meskipun jenis yang dipelajari dan cara belajarnya selalu berubah seiring dengan bertambahnya usia. Orang dewasa senang belajar bila aktivitas belajarnya dapat memecahkan masalahnya, menjadi bermakna bagi situasi kehidupannya.

2.2 Keaksaraan Dasar

Menurut buku “Petunjuk Teknis Pengajaran dan Pengelolaan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2012” oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:5) yang

peneliti dapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Keaksaraan Dasar adalah:

- a. Kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung, untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.
- b. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59.

2.3 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Menurut Ife dalam Adi (2013:207) “pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged people*) atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka (*personal choices and life*); kesempatan (*chances*); definisi kebutuhan (*need definition*); gagasan (*ideas*); institusi (*institutions*); sumber-sumber daya (*resources*); aktivitas ekonomi (*economic activity*) dan reproduksi (*reproduction*) dengan melakukan intervensi melalui pembuatan perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*); aksi politik dan sosial (*social and political action*); serta pendidikan (*education*).”

Pengertian pemberdayaan di atas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan suatu pemberdayaan masyarakat harus melihat dari seluruh kondisi sasaran penerima manfaat pemberdayaan, dari melihat kebutuhannya hingga hasil yang diharapkan (*output*). Pemberdayaan dilakukan dengan sasaran kelompok masyarakat dan tujuan yang

berbeda-beda sesuai bidang permasalahan di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Konsep partisipasi menurut Uphoff dan Cohen dalam Ife (2008:296) adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mereka sendiri agar terciptanya keaktifan dari masyarakat atau penerima manfaat program itu sendiri sehingga program berjalan sesuai tujuan hasilnya.

2.4 Keaksaraan Fungsional sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kusnadi (2005:221) proses pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan fungsional, maksudnya adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada individu/ kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomi dan politik, sehingga dapat memperbaiki kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan ini, menurut Yunus dalam Kusnadi (2005:221) ada lima prinsip sikap dasar yang patut diperhatikan: (1) kepedulian terhadap masalah, kebutuhan, dan potensi/sumberdaya masyarakat; (2) kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program; (3) fasilitasi (pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses

kegiatan; (4) adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan peran serta semua komponen lembaga atau individu terutama warga belajar dalam proses kegiatan; dan (5) mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapainya.

2.5 Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Lalu, implementasi juga merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). (Winarno. 2012:147).

2.5.1 Komponen-komponen Implementasi Program Keaksaraan Fungsional

Implementasi program KF harus menyangkut komponen-komponen berikut (Kusnadi, 2005:217) :

a. Perencanaan Strategis

Penerapan kebijakan program Keaksaraan Fungsional dengan sendirinya memerlukan model perencanaan strategis tersebut yang berlainan dengan model perencanaan yang biasa digunakan pada masa lalu. Jadi, perencanaan strategis adalah alat

pengubah dan pengendali perubahan, sesuai tujuan yang diharapkan, agar program Keaksaraan Fungsional menjadi lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan bermanfaat langsung pada masyarakat

b. Kerjasama yang Efektif

Kerjasama ini meliputi berbagai komponen seperti pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan program, dukungan (*support system*) terhadap keberhasilan program dan pelaksanaan evaluasi program.

c. Pelatihan yang Efektif

Diperlukan pelatihan yang selain efektif, juga hasil akhirnya dapat mengembangkan dan mensosialisasikan program Keaksaraan Fungsional di masyarakat.

d. Dukungan Birokrasi dan Masyarakat

Agar pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional dapat maksimal, paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama* adanya dukungan dari sistem birokrasi, dan *kedua* dukungan dari masyarakat atau warga belajar itu sendiri.

e. Pengelolaan Kelompok Belajar

Agar pengelolaan kelompok belajar Keaksaraan Fungsional, dapat berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, paling tidak ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, seperti karakteristik warga

belajar, jadwal pertemuan, kegiatan belajar, bahan belajar, dan kelangsungan kelompok.

1.) Karakteristik Warga Belajar

Kesadaran untuk peduli terhadap masyarakat sasaran program perlu diperlihatkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, dalam bentuk memasukan kepuasan sasaran dalam formulasi sasaran Dikmas, dan menjadikannya sebagai nilai atau budaya kerja aparat Dikmas baik di pusat maupun di daerah. Artinya harus benar-benar memperhatikan minat dan kebutuhan belajar mereka, agar terpuaskan apa yang mereka inginkan.

2.) Rencana Belajar

Kelompok belajar berkewajiban memilih dan mengelola pertemuan belajar mereka sendiri melalui pembuatan kesepakatan belajar secara bersama-sama. Mereka diberikan kebebasan dalam mengurangi dan mengubah jam pertemuan sesuai situasi dan kondisinya misalnya pada saat musim tanam, panen atau lainnya. Namun demikian semuanya tergantung pada kesepakatan belajar yang telah dibuat, guna meneruskan pertemuan secara rutin dan teratur berdasarkan kesepakatan tersebut.

3.) Kegiatan Belajar

Secara garis besar kegiatan belajar mengajar pada program KF terdiri atas lima langkah kegiatan yaitu, menulis, membaca, berhitung, diskusi dan aksi. Langkah-langkah

tersebut bukan berarti langkah yang harus berurutan, tetapi bisa saja dilakukan secara acak, misalnya dimulai dari diskusi, kemudian belajar membaca atau menulis dan seterusnya.

4.) Bahan Belajar

Dalam hal ini tutor tidak hanya tergantung dari bahan belajar Buku Tematik Keaksaraan Fungsional saja, warga belajar juga dapat dilibatkan dalam pembuatan berbagai bahan belajar yang mereka buat sendiri baik melalui gambar atau penulisan tentang pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri.

f. Penilaian yang Komprehensif

Kemampuan warga belajar pada awal masuk kelompok belajar tidak sama, untuk itu tutor perlu menilai kemampuan awal setiap warga belajar. Penilaian pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran keterampilan calistung (baca tulis berhitung) dasar, dan minat serta kebutuhan fungsionalnya. Hasilnya akan memudahkan tutor dalam mengelompokkan warga belajar berdasarkan tingkat kemampuannya, dan menetapkan isi belajar serta metode/teknik pembelajarannya.

g. Dukungan yang Pro-aktif

Dukungan dan bantuan pro-aktif dari penyelenggara atau instansi lembaga yang terkait sangat penting untuk kelangsungan kegiatan belajar. Petugas-petugas yang

mempunyai wewenang juga perlu memonitor, memotivasi dan membenahi administrasi kegiatan belajar. Di samping itu pada saat mereka melakukan supervisi atau monitoring, perlu juga sekaligus memberikan *in-service training* teknik-teknik pembelajaran dan pengelolaan kelompok belajar.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini mendasar pada hasil penelitian yang berfokus pada implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.

Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini adalah informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk membantu dalam menggumpulkan data dan menganalisisnya. Sedangkan teknik analisa data menggunakan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data mentah, transkrip data,

pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan data sementara, triangulasi dan terakhir penyimpulan akhir. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

PEMBAHASAN

4.1 Program Keaksaraan Fungsional

Desa Karangpring telah melaksanakan program Keaksaraan Fungsional sejak tahun 2006. Hampir setiap tahun melaksanakan program tersebut melalui dana hibah yang diterima dari pengajuan proposal kepada Bapak Gubernur Jawa Timur.

Penyelenggara program Keaksaraan Fungsional disebut dengan pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan Dinas Pendidikan Nasional di tingkat desa dan kecamatan. Penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring adalah salah satu yayasan pondok pesantren yang ada di Desa Karangpring yaitu, Yayasan Pondok Pesantren Islam (YPPI) "Nurul Wajid".

Ketentuan waktu dan tempat pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional adalah bahwa waktu dan jadwal pertemuan sebaiknya tidak hanya ditentukan oleh penentu kebijakan atau pemberi dana saja, namun harus sedapat mungkin disesuaikan dengan cara kerja dan waktu luang warga belajar dan tempat

pertemuan sebaiknya yang dapat menyenangkan warga belajar untuk belajar. Tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar pendidikan Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring adalah mushola-mushola terdekat. Lokasinya berada di tengah-tengah para warga belajar, sehingga memudahkan para warga belajar untuk datang ke tempat pembelajaran. Mushola yang digunakan total berjumlah sepuluh mushola yang berada di Desa Karangpring.

4.2 Implementasi Program Keaksaraan Fungsional

4.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan program melalui empat tahap, seperti ungkapan informan pokok NA, bahwa:

"Dari awal kalau kemarin yang tahun 2013 kita laksanakan sebagaimana biasanya. Pertama adalah kita bermusyawarah bersama dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah UPT Pendidikan Sukorambi bersama dengan para pengurus Yayasan bahwa kita laksanakan program KF akhirnya disitu diadakan identifikasi warga belajar. Artinya siapa saja yang belum bisa membaca menulis. Termasuk identifikasi kita itu kepada tutor. Artinya siapa saja tutor yang mengajar dan siap. Setelah itu kita baru melaksanakan kegiatan sebagaimana identifikasi sebelumnya soal warga belajar, tutor, juga anggarannya. Karena pendidikan ini memang harus bermusyawarah dengan warga belajar tanpa dengan WB kita bakal kesulitan. Ya karena muridnya para orang tua, maka musyawarah dimana, waktunya kapan, jam berapa dsb. Dan selanjutkan

mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Provinsi hingga mendapat kepastian dapat tidaknya dana dari sana ”

Maka, tahap persiapan terdiri dari empat tahapan, yaitu musyawarah dengan UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi, mempersiapkan Warga Belajar, pendekatan kepada warga belajar dan pengajuan proposal

1.) Musyawarah dengan UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi

Musyawarah dengan UPT Pendidikan Sukorambi merupakan tahap koordinasi bersama untuk memulai pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring. Musyawarah bersama penyelenggara program YPPI Nurul Wajid dengan dinas yang terkait yaitu UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi. Hal ini sesuai dengan komponen implementasi program Keaksaraan Fungsional, yaitu dukungan yang proaktif. Bahwa bentuk musyawarah dengan UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi ini adalah bentuk adanya dukungan yang proaktif, di mana instansi lembaga yang terkait berwenang melakukan pengawasan, monitoring, motivasi dan menerima laporan hasil berjalannya program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring.

2.) Mempersiapkan Warga Belajar dan Tutor

Dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti menyimpulkan bahwa tercatat jumlah

calon warga belajar 100 Warga Belajar yang bersedia mengikuti kegiatan belajar tersebut. Dengan total 78 Warga Belajar perempuan dan 22 Warga Belajar laki-laki. Dan jumlah calon tutor adalah 10 tutor termasuk NA sebagai ketua penyelenggara dan NM yang merangkap sebagai tutor.

3.) Pendekatan Kepada Warga Belajar

Untuk mengajak para warga buta huruf untuk belajar yang umumnya para orang tua atau orang dewasa tidaklah mudah, karena mereka yang sudah bekerja dan memiliki keluarga lebih memilih bekerja daripada belajar. Maka, penyelenggara dan tutor menggunakan strategi mengajak warga belajar, yaitu: dengan memberikan paralon, membangun gudang penyimpanan keperluan hajatan warga, mengajak warga belajar dengan memanfaatkan kegiatan rutin muslimatan untuk penentuan waktu belajar mengajar dengan warga belajar. Sehingga, warga tertarik untuk belajar. Hal tersebut artinya para penyelenggara dan tutor di Desa Karangpring dapat membaca karakter warga belajar di desa mereka. Membaca karakter warga belajar merupakan salah satu komponen yang mendorong program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring berjalan dengan lancar.

4.) Pengajuan Proposal

Penentuan dilaksanakannya program KF di Desa Karangpring karena menunggu kepastian

diberi atau tidaknya oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Proposal tersebut diajukan pada September 2012 dan kegiatan dilaksanakan setahun kemudian, yakni dari 25 Agustus 2013 hingga 15 Desember 2013.

4.2.2 Tahap Pelaksanaan

1.) Menentukan Kelompok Belajar

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan menentukan kelompok belajar. Penyelenggara bersama tutor menentukan kelompok atau administrasi belajar dengan minimal 10 peserta didik setiap kelompok, ini sesuai dengan deskripsi kegiatan Keaksaraan Dasar. Ketentuan dengan minimal 10 warga belajar agar kegiatan belajar berjalan efektif. Total Warga Belajar pada program Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013 adalah 100 Warga Belajar dan dibagi menjadi 10 kejar atau kelompok belajar. Tiap kelompok belajar memiliki nama kelompok, yaitu kelompok Duku 1 hingga Duku 10. Dan setiap kelompok berisi 10 warga belajar.

2.) Penyusunan Jadwal Belajar

Waktu dan jadwal pertemuan tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara atau tutor saja, namun harus sedapat mungkin disesuaikan dengan cara kerja dan waktu luang warga belajar. Informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan tersebut dapat dijelaskan bahwa partisipasi warga belajar dalam penentuan jadwal belajar mereka sendiri

berpengaruh besar dalam kelancaran program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar khususnya di Desa Karangpring. Pasalnya memang dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional warga belajar wajib mengutarakan, memilih dan mengelola pertemuan belajar mereka sendiri melalui pembuatan kesepakatan belajar secara bersama-sama.

3.) Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar itu sendiri meliputi lima pembelajaran, yaitu; membaca, menulis, berhitung, diskusi dan aksi. Lima pembelajaran tersebut tidak diharuskan berurutan dilakukan. Proses pembelajaran di Desa Karangpring yang meliputi 10 kelompok belajar ini dilakukan tidak berurutan. Para tutor mengikuti keinginan warga belajar mereka masing-masing.

Pendekatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau konsep andragogi dimana proses pembelajaran dilakukan dengan konsep pembelajaran atau pendidikan orang dewasa, seperti tentang masalah lingkungan, pengalaman pribadi hingga tentang masalah suatu peristiwa atau kejadian-kejadian di sekitar lingkungan warga belajar di Desa Karangpring itu semua digali dari pendapat dan diketahui oleh para warga belajar.

terdapat strategi menarik yang dilakukan tutor saat proses belajar berlangsung, yaitu masing-masing dari warga belajar diminta untuk menuliskan nama dan kemudian menghitung jumlah huruf yang terdapat dalam nama mereka. Dari kegiatan ini tutor dapat memenuhi lima komponen penting dalam pembelajaran program Keaksaraan Fungsional, yaitu; membaca, menulis, berhitung, mendengar sekaligus berbicara. Selanjutnya, pelaksanaan proses pembelajaran ini tutor dan warga belajar diberikan fasilitas belajar seperti yang sudah ditentukan. Untuk tiap tutor fasilitas yang diberikan ialah papan, spidol, buku tematik untuk pedoman mengajar. Lalu untuk warga belajar ialah buku tematik, buku tulis dan peralatan tulis (pensil, pulpen, penghapus, penggaris).

4.) Pendidikan Latihan Keterampilan

Pendidikan latihan keterampilan diadakan pada akhir proses pembelajaran sebagai kegiatan tambahan pendidikan keaksaraan dasar kepada warga belajar di Desa Karangpring. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember di mana pendidikan latihan keterampilan tersebut diberikan apabila warga belajar sudah bisa calistung (baca, tulis, berhitung) atau pada saat warga belajar sudah mengalami tingkat kejenuhan. Kegiatan tambahan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar para warga belajar yang

mayoritas orang dewasa tersebut dan juga untuk menambah keterampilan warga belajar. Karena orang dewasa yang rentan dengan rasa bosan dan jenuh ketika disuruh belajar. Maka dari itu, kegiatan keterampilan ini adalah salah satu strategi penyelenggara agar warga belajar di Desa Karangpring tidak merasa bosan dan memiliki semangat kembali untuk belajar calistung. Keterampilan yang dipraktikkan yaitu; membuat keranjang, membuat keripik singkong dan talas, membuat onde-onde dan membuat pupuk kompos. Bahan-bahan keterampilan tentunya memanfaatkan sumber daya alam sekitar desa Karangpring.

4.2.3 Tahap Penilaian Hasil Pembelajaran

Dalam proses penilaian, terdiri dari tiga tahapan, seperti penuturan informan NA:

“Secara umum kalau soal penilaian ada 5 poin itu tadi, ada membaca, menulis, berhitung, berbicara dan mendengar. Kalau bagaimana prosesnya itu tiap bulannya ada lembar penilaiannya, jadi disitu keliatan perkembangan WB tiap bulannya. Di akhir proses evaluasinya ya dilihat warganya bagaimana membacanya, menulisnya, dsb.. Sudah bisa atau tidak. Kalau sudah dinyatakan lulus mereka mendapatkan SUKMA semacam sertifikat gitu. Surat Keterangan Melek Aksara. Begitu.”

1.) Penilaian Secara Periodik

Penilaian secara periodik adalah penilaian terhadap belajar calistung warga belajar tiap bulan agar mengetahui perkembangan warga belajar dari lima komponen dalam program Keaksaraan Fungsional, yaitu dalam membaca,

menulis, berhitung, berbicara dan mendengarkan.

2.) Penilaian Akhir

Penilaian akhir adalah penilaian diambil dari hasil tes akhir yang diberikan kepada warga belajar. Warga belajar diakhir pembelajaran harus melakukan tes akhir tersebut. Dalam hal ini bahan tes akhir warga belajar mengikuti yang ada pada buku tematik.

Tutor dapat menguji mereka satu persatu ataupun bersamaan tergantung tutor yang memahami karakter para warga belajar.

3.) Pemberian SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara)

Tahap penilaian hasil belajar warga belajar dalam pembelajaran calistung Keaksaraan Dasar program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013 adalah pembagian SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara). Namun, peneliti mendapatkan bahwa belum ada pembagian kepada warga belajar dikarenakan ada 'kemacetan' pembagian SUKMA dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

4.3 Faktor Pendorong Keberhasilan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada Tahun 2013

Faktor-faktornya terdiri dari: rasa keingintahuan warga belajar Desa Karangpring yang dari dirinya sendiri, adanya honor tutor

sebagai bentuk penyemangat tutor di sepuluh kelompok di Desa Karangpring, dilaksanakannya kegiatan tambahan pendidikan keterampilan untuk warga belajar dan penentuan tempat belajar yang strategis dan mudah dijangkau warga belajar serta waktu yang menyesuaikan waktu luang dan memanfaatkan kegiatan rutin muslimatan warga belajar.

4.4 Kendala YPPI Nurul Wajid dalam Program Keaksaraan Fungsional (KF) dan Upaya Mengatasinya

Kendala yang dominan adalah rasa malas atau perasaan tidak butuh dari warga belajar saat pembelajaran berlangsung. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara beserta tutor saat itu, yaitu tetap sabar dan telaten dalam memberikan pembelajaran kepada warga belajar, menentukan tutor seorang tokoh masyarakat di Desa Karangpring, membawa makanan dan minuman sebagai penambah semangat dan penghilang kebosanan warga belajar saat pembelajaran berlangsung, dan memanfaatkan kegiatan rutin warga belajar di desa, yaitu istigosah dan acara muslimatan lainnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (KF) tingkat Dasar di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tahun 2013 telah mengikuti acuan Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKK Dasar) dengan pelaksanaan minimal 114 jam masa pembelajaran. Maka dapat disimpulkan program Keaksaraan Fungsional yang terlaksana pada tanggal 25 Agustus hingga 15 Desember 2013 berhasil dilaksanakan sesuai dengan pedoman program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar. Keberhasilan dilihat dari unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan system pembelajaran Keaksaraan Fungsional, seperti; tujuan, kelompok sasaran, bahan belajar, sarana belajar, kegiatan, waktu dan tempat pembelajaran dirancang sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi lokal dimana warga belajar di Desa Karangpring yang mayoritas bekerja sebagai petani. Keberhasilan juga dilihat dengan adanya tingkat pencapaian hasil pembelajaran warga belajar dalam kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengar dan berbicara, sehingga mereka dapat dikatakan melek aksara serta memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh warga belajar. Sesuai dengan data hasil Rekap Hasil Evaluasi dan Perkembangan Warga Belajar Desa

Karangpring 2013 yang menunjukkan bahwa 80% warga belajar telah mampu membaca, menulis, berhitung, mendengarkan dan berbicara.

Implementasi program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa dimulai dari tahap persiapan hingga penilaian hasil pembelajaran telah sesuai dengan komponen-komponen implementasi program KF yang ada. Berikut penjelasannya:

a. Tahap Persiapan

Sesuai dengan komponen implementasi program Keaksaraan Fungsional yakni, perencanaan strategis. Bentuk perencanaan strategis terlihat dari awal penyelenggara melakukan musyawarah dengan instansi lembaga terkait, yaitu UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi, dilanjut dengan mempersiapkan warga belajar dan tutor. Kurangnya adalah pelatihan yang efektif untuk para tutor. Selanjutnya dalam pendekatan pada warga belajar, penyelenggara mempersiapkan strategi agar calon warga belajar tertarik mengikuti pembelajaran. Dan terakhir pengajuan proposal kepada Gubernur Jawa Timur untuk pengajuan dana hibah.

b. Tahap Pelaksanaan

Sesuai dengan apa yang diharapkan, pengelolaan kelompok belajar dari melihat

karakteristik warga belajar; jadwal pertemuan; kegiatan belajar; bahan belajar dan kelangsungan kelompok, program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring tahun 2013 meliputi dimulai dengan kegiatan menentukan kelompok belajar, penyusunan jadwal belajar, proses pembelajaran dan pendidikan latihan keterampilan sebagai kegiatan tambahan pembeda dari desa lain. Serta adanya dukungan dari para penyelenggara dengan tutor juga rasa minat belajar warga belajar merupakan bentuk dukungan birokrasi dan masyarakat

c. Tahap Penilaian Hasil Pembelajaran

Tahap akhir terdiri dari penilaian secara periodik, tes akhir dan pemberian SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara).

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi R. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi 2012)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Petunjuk Teknis Pengajaran dan Pengelolaan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri*

Tahun 2012. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Ife, Jim & Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Kusnadi, M.Pd, dkk.2005. *Pendidikan Keaksaraan Filosofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional.

BPS. 2012. *Indikator Pendidikan , 1994-2012*, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28.

(diakses pada tanggal 22 Januari 2014).

_____. 2013. *Provinsi Jatim Berhasil Menekan Angka Buta Aksara*, <http://bappeda.jatimprov.go.id/2013/03/06/provinsi-jatim-berhasil-menekan-angka-buta-aksara/>.

(diakses pada tanggal 24 Januari 2014).

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : C A P S